

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat suku Batak Toba terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada pemilu 2024, dengan uji hipotesis H1 diterima dan H0 ditolak, menyimpulkan bahwa masyarakat suku Batak Toba cenderung memiliki pandangan positif terhadap partisipasi politik perempuan dalam konteks pemilu 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dukungan atau penerimaan terhadap peran aktif perempuan dalam kehidupan politik lokal.

Hasil penelitian dapat memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan atau inisiatif sosial yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Rekomendasi-rekomendasi yang muncul dari penelitian ini dapat mendukung langkah-langkah konkret untuk memperkuat peran perempuan dalam arena politik lokal.

Secara keseluruhan, untuk mengatasi tantangan partisipasi politik perempuan, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan perubahan budaya, kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, dan inisiatif untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam politik. Hanya dengan upaya bersama dari berbagai pihak, kita dapat mencapai masyarakat yang lebih inklusif dan mewujudkan kesetaraan gender di semua level kehidupan politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada tantangan, persepsi masyarakat Suku Batak Toba terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Humbang Hasundutan menunjukkan

tren positif dengan dukungan yang semakin meningkat. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi hambatan budaya dan struktural agar partisipasi politik perempuan dapat lebih optimal.

4.2. SARAN

1. Memberikan penyuluhan dan workshop di tingkat desa dan kecamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik perempuan. Fokus pada pendidikan gender yang mengedukasi masyarakat tentang hak-hak politik perempuan. Bukan hanya oleh partai dan penyelenggara pemilu atau LSM yang concern terhadap pemilu dan perempuan saja, tetapi masyarakat juga dituntut aktif untuk sadar gender, bahwa perempuan juga bisa dan mampu berkecimpung dalam ruang-ruang publik khususnya dalam ruang politik, sebagai fokus pembuatan kebijakan baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.
2. Meningkatkan program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan politik, dan mentoring dari politisi perempuan yang sudah berpengalaman. Mendorong pemerintah daerah dan nasional untuk membuat kebijakan yang mendukung partisipasi politik perempuan, seperti kuota gender dalam pemilihan legislatif dan insentif bagi partai politik yang mencalonkan perempuan.
3. Kepada para peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap partisipasi politik perempuan. Faktor-faktor ini bisa mencakup aspek pendidikan, budaya, agama, pengalaman pribadi, dan keberadaan tokoh perempuan dalam politik. Sehingga diharapkan dapat menggunakan data dalam tulisan ini

dengan sebaik mungkin serta dapat menambahkan berbagai hal yang dirasa kurang guna menciptakan suatu karya tulis ilmiah yang bermanfaat bagi orang lain dan khasanah ilmu pengetahuan.

4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti dengan metode yang sama dapat menggunakan tingkat kesalahan yang lebih kecil minimal 10%.